

Demokrasi



Demokrasi

- Demokrasi berasal bahasa Yunani
Yaitu *Demos* yang berarti rakyat
Cratos atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau
kekuasaan
Abad ke-4 SM dan ke-6 M → *Direct Democracy* di Yunani



Dalam perkembangannya demokrasi secara langsung mulai sulit dilaksanakan, karena :

- Tidak adanya tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak
- Untuk melakukan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan
- Hasil persetujuan secara mufakat sulit tercapai, karena sulitnya memungut suara dari peserta yang adil.
- Masalah yang dihadapi oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut

Demokrasi atas penyaluran kehendak rakyat yaitu *Demokrasi langsung* dan *Demokrasi tidak langsung*

Untuk negara-negara modern, penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena alasan :

- Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan
- Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak
- Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri didalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara

Secara terminologi, banyak ahli yang mengemukakan pengertian demokrasi, namun dasar demokrasi selalu mengacu pada rakyat, yaitu :

- Pelaksana kekuasaan negara ialah wakil rakyat terpilih karena rakyat yakin segala kepentingannya akan diperhatikan.
- Cara melaksanakan kekuasaan negara dengan senantiasa mengingat kehendak rakyat dan memenuhi kehendak rakyat.

Batas kekuasaan negara demokrasi ditentukan dengan sebanyak mungkin memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat asal tidak menyimpang dasar demokrasi.

“Government of the people, by the people and for the people”

Abraham Lincoln (1863)

Secara substantif terdapat dua prinsip utama dalam demokrasi :

- Kebebasan/persamaan
(freedom/equality)
- Kedaulatan Rakyat (people’s
sovereignty)



Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan

Pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato yaitu :

- Monarki
- Tirani
- Aristokrasi
- Oligarki
- Demokrasi
- Mobokrasi/Okhlokrasi

Sedangkan Machiaveli membagi bentuk pemerintahan :

- Monarki
- Republik

Demokrasi Sebagai Sistem Politik

demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Henry B Mayo)

Demokrasi Sebagai Sistem Politik

sistem politik dewasa ini dibagi menjadi :

- Sistem politik demokrasi
- Sistem politik non demokrasi (otoriter, totaliter, diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut dan sistem komunis)
- Sistem politik Islam

Prinsip –prinsip dari sistem politik demokrasi

- Pembagian kekuasaan
- Pemerintah konstitusional
- Rule of Law
- Pemerintahan mayoritas
- Diskusi
- Pemilihan umum yang bebas
- Tidak single Partai Politik
- Kebebasan Pers
- Pengakuan terhadap hak minoritas
- Perlindungan Hak Asasi Manusia
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak
- Pengawasan terhadap administrasi negara
- Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan dan tanpa paksaan dari lembaga manapun
- *Merit sytem* bukan *poll system* dalam penempatan pejabat pemerintahan
- Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi
- Jaminan terhadap kebebasan individu

Demokratisasi

- Penerapan kaidah-kaidah atau prinsip demokrasi pada setiap politik kenegaraan. Tjuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi.
- Demokratisasi melalui beberapa tahapan :
 1. Pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi
 2. Pembentukan lembaga-lelabaga dan tertib politik demokrasi
 3. Konsolidasi demokrasi
 4. Praktik Demokrasi sebagai budaya politik negara

Demokratisasi

Setidaknya 5(lima) kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi :

- Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan
- Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan warga negara seperti pangan, kesehatan dan pendidikan
- Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan perbedaan sosial politik warga
- Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi, rasa tanggung jawab kolektif
- Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dan menggunakan sumber-sumber publik yang efisien
- Berkelanjutan

Demokrasi di Indonesia

- Demokrasi Desa (rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari kekuasaan absolut)
- Demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional yaitu seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai dan adil dan menguntungkan bangsa.
- Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila (Kedaulatan rakyat, Republik, Negara berdasar atas hukum, pemerintahan yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, prinsip ketuhanan)

Demokrasi Barat dan Indonesia

- Dalam pandangan Barat individu adalah makhluk otonom yang bebas sepenuhnya untuk mengejar semua kehendaknya. Bahwa individu membentuk kehidupan bersama dengan individu lain adalah karena dorongan rasionya untuk memperoleh keamanan dan kesejahteraan yang terjamin, bukan karena secara alamiah individu ditakdirkan hidup bersama individu lain. Sebaliknya dalam pandangan Indonesia individu adalah secara alamiah bagian dari kesatuan lebih besar, yaitu keluarga, sehingga terjadi Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan. Oleh sebab itu pandangan bangsa Indonesia adalah bahwa hidup merupakan Kebersamaan atau Kekeluargaan. Individu diakui dan diperhatikan kepentingannya untuk mengejar yang terbaik baginya, tetapi itu tidak lepas dari kepentingan Kebersamaan / Kekeluargaan.

Demokrasi Barat dan Indonesia

- Kalau pelaksanaan demokrasi Barat dinamakan sekuler dalam arti bahwa tidak ada faktor Ketuhanan atau religie yang mempengaruhinya, sebaliknya demokrasi Indonesia tidak dapat lepas dari faktor Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Meskipun NKRI bukan negara berdasarkan agama atau negara agama, namun ia bukan pula negara sekuler yang menolak faktor agama dalam kehidupan bernegara.
- Dalam demokrasi Barat adalah normal kalau partai politik mengejar kekuasaan agar dengan kekuasaan itu dapat mewujudkan kepentingannya dengan seluas-luasnya (The Winner takes all). Ia hanya mengakomodasi kepentingan pihak lain karena dan kalau itu sesuai dengan kepentingannya. Jadi sikap Win-Win Solution yang sekarang juga sering dilakukan di Barat bukan karena prinsip Kebersamaan, melainkan karena faktor Manfaat semata-mata. Di Indonesia berdasarkan Pancasila demokrasi dilaksanakan melalui Musyawarah untuk Mufakat. Jadi dianggap tidak benar bahwa pihak yang sedikit jumlahnya dapat di "bulldozer" oleh pihak yang besar jumlahnya. Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia pada prinsipnya mengusahakan Win-Win Solution dan bukan karena faktor manfaat semata-mata